

ANALISIS ANGGARAN GAJI DAN TUNJANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN

Studi Kasus: KANTOR KECAMATAN BANDUNG KIDUL

Wajib Ginting¹, Shifa Parwati²

^{1,2} Program Studi Akuntansi Universitas INABA

Jln. Soekarno Hatta No. 448 Bandung 40266, Telp. 022 75642823, Fax. 022 7564282

¹wajibginting@lpkia.ac.id, ²shifaparwati1406@gmail.com,

ABSTRAK

Anggaran merupakan rencana keuangan masa yang akan datang yang mencakup harapan terhadap pendapatan, biaya, dan transaksi keuangan lain dalam masa satu tahun. Tahap penyusunan anggaran merupakan tahap yang sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja justru bisa menggagalkan program yang telah disusun sebelumnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses penyusunan anggaran dan laporan realisasi anggaran pada Kantor Kecamatan Bandung Kidul.

Penyusunan anggaran pada organisasi sektor publik dapat membantu mewujudkan akuntabilitas. Laporan Realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Metode yang digunakan adalah metode komparatif yaitu teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antar elemen yang sama untuk beberapa periode berurutan dengan pendekatan analisis perubahan dari tahun ke tahun.

Hasil penelitian ini menunjukkan rata-rata penyerapan anggaran sebesar 90% dari tahun 2012 hingga 2016 yang artinya kinerja pemerintah daerah pada Kantor Kecamatan Bandung Kidul dapat dikatakan baik dan efisien dalam penggunaan anggaran.

Kata Kunci: *Anggaran, Realisasi Anggaran, Gaji dan Tunjangan*

1. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan sendiri dan kepentingan masyarakat setempat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Konsekuensi logis dari perubahan tersebut, maka anggaran kecamatan disusun dengan prinsip anggaran berbasis kinerja (Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002). Anggaran berbasis kinerja dilakukan untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik

tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis.

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan cara melihat kinerjanya melalui Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam suatu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran juga menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

Kantor Kecamatan Bandung Kidul merupakan salah satu perangkat daerah yang didirikan untuk melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas kinerjanya, maka dibutuhkan pengelolaan anggaran yang baik terutama dalam mengelola anggaran gaji dan tunjangan. Pembayaran gaji begitu sangat penting karena merupakan bentuk balas jasa dari perusahaan atas pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai untuk kepentingan perusahaan dan juga merupakan sebuah apresiasi atas kinerja yang telah dilakukan. Pengelolaan anggaran gaji harus dilakukan secara tepat dan dapat di

pertanggungjawabkan guna menghindari penyelewengan atas anggaran yang telah dianggarkan dalam periode tahun anggaran.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pada hakekatnya memberi peluang yang lebih besar kepada daerah untuk mengoptimalkan potensi yang ada, baik menyangkut sumber daya manusia, maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah.

Anggaran merupakan masalah pokok dan topik penting yang sering dihadapi oleh perusahaan swasta maupun instansi pemerintah dan tidak terkecuali pada Kantor Kecamatan Bandung Kidul yang merupakan salah satu dari sekian banyak kecamatan yang berada di Kota Bandung sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Alokasi anggaran gaji dan tunjangan pada Kantor Kecamatan Bandung Kidul ternyata tidak sepenuhnya terealisasi, yakni selalu terjadi sisa anggaran dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang terjadi hampir setiap tahun. Adapun identifikasi masalah pada Kantor Kecamatan Bandung Kidul adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penyusunan anggaran gaji dan tunjangan pada Kantor Kecamatan Bandung Kidul?
2. Bagaimana perbandingan anggaran gaji dan tunjangan dengan realisasinya pada Kantor Kecamatan Bandung Kidul?
3. Apa penyebab terjadinya selisih anggaran gaji dan tunjangan dengan realisasinya pada Kantor Kecamatan Bandung Kidul
4. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kantor Kecamatan Bandung Kidul ?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan Metode Analisis Komparatif. Metode Analisis Komparatif merupakan teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antar elemen (laporan keuangan) yang sama untuk beberapa periode yang berurutan. Perbandingan dilakukan dengan pendekatan *Year-to-Year Changes Analysis*, perbandingan dibuat dengan cara menganalisis perubahan absolut dan menghitung perubahan relatif (persentase) dari tahun ke tahun setiap elemen laporan keuangan. Perubahan absolut diperlukan untuk memperoleh perspektif yang tepat dan kesimpulan yang valid mengenai perubahan yang terjadi. Perubahan relatif (persentase) diperlukan untuk menentukan berarti tidaknya (signifikasi) dari setiap perubahan yang terjadi.

2. Dasar Teori

Tujuan adanya anggaran menurut Cristina Ellen yaitu:

1. Untuk menyatakan harapan sasaran perusahaan secara jelas dan formal, sehingga bisa menghindari kerancuan dan memberikan arah terhadap apa yang hendak dicapai manajemen
2. Untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait sehingga anggaran dimengerti, didukung dan dilaksanakan.
3. Untuk menyediakan rencana terinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarah yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan
4. Untuk mengkoordinasi cara atau metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber daya

Tujuan anggaran secara garis besar menurut M.Nafarin yaitu untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun, serta menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja baik individu atau kelompok dan sebagai penyedia informasi yang mendasari perlu tidaknya tindakan koreksi.

Penilaian kinerja menurut Bambang wahyudi yaitu suatu evaluasi yang dilakukan secara periodik dan sistematis tentang prestasi kerja atau jabatan seorang tenaga kerja, termasuk potensi pengembangannya.

3. Pembahasan

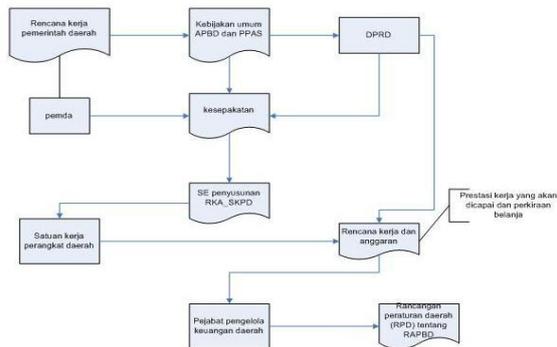
3.1 Mekanisme Penyusunan dan Penetapan APBD

Untuk mengatur kegiatan perekonomian daerah, maka suatu daerah harus membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penetapan dan penyusunan APBD merupakan rencana keuangan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran.

Proses perencanaan dan penyusunan APBD mengacu pada PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang secara garis besar sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
2. Penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA)
3. Penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
4. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)
5. Penyusunan Rancangan Pemerintah Daerah (RAPERDA APBD)
6. Penetapan APBD

Dari uraian di atas, maka proses penyusunan APBD dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 : Mekanisme Penetapan dan Penyusunan APBD

3.2 Anggaran Gaji dan Tunjangan di Kecamatan Bandung Kidul

Jumlah yang dibayarkan kepada setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdiri dari gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan. Gaji pokok tersebut di tambahkan dengan tunjangan-tunjangan yang dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Tunjangan Istri / Suami
- b. Tunjangan Anak
- c. Tunjangan Umum
- d. Tunjangan Struktural
- e. Tunjangan Fungsional
- f. Tunjangan Beras
- g. Tunjangan Pajak

Adapun potongan gaji yaitu :

- a. Iuran Wajib Pajak (IWP)
- b. Tabungan Perumahan Umum (TAPERUM)

Tabel 1 – Anggaran Gaji dan Tunjangan

Tahun	Anggaran
2012	3.435.570.227,40
2013	4.106.386.943,85
2014	4.450.935.300,00
2015	4.968.108.781,00
2016	5.659.324.410,00

3.3 Realisasi Anggaran Gaji dan Tunjangan pada Kantor Kecamatan Bandung Kidul

Tabel 1 – Anggaran Gaji dan Tunjangan

Tahun	Realisasi
2012	3.325.651.578,00
2013	3.874.632.421,00
2014	3.936.383.284,00
2015	4.801.494.917,00
2016	5.469.024.008,00

4. Analisis dan Pembahasan Permasalahan

Dalam penelitian ini alat yang digunakan dalam analisis belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Analisis Varians (Selisih) Belanja

Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran

2. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja

Tabel 3 : Rasio Efisiensi Belanja

KATEGORI	PERSENTASE (%)
Tidak Efisien	>100%
Sangat Efisien	75%-89%
Efisien	90%-99%

4.1 Analisis Anggaran Gaji dan Tunjangan Tahun 2012

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
		s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
BELANJA	5.660.809.840,40	0,00	5.496.922.704,00	5.496.922.704,00	-163.887.136,40
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.435.570.227,40	0,00	3.325.651.578,00	3.325.651.578,00	-109.918.649,40
BELANJA PEGAWAI	3.435.570.227,40	0,00	3.325.651.578,00	3.325.651.578,00	-109.918.649,40
BELANJA LANGSUNG	2.225.239.613,00	0,00	2.171.271.126,00	2.171.271.126,00	-53.968.487,00
Belanja Pegawai	173.576.500,00	0,00	173.454.500,00	173.454.500,00	-122.000,00
Belanja Barang dan Jasa	1.181.586.113,00	0,00	1.142.292.701,00	1.142.292.701,00	-39.293.412,00
Belanja Modal	870.077.000,00	0,00	855.523.925,00	855.523.925,00	-14.553.075,00
SURPLUS / DEFISIT	-5.660.809.840,40	0,00	-5.496.922.704,00	-5.496.922.704,00	163.887.136,40
SISA LEBIH / KURANG TAHUN BERKENAAN	-5.660.809.840,40	0,00	-5.496.922.704,00	-5.496.922.704,00	163.887.136,40

Gambar 2 : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2012

$$REB = \frac{3.325.651.578,00}{3.435.570.227,40} \times 100\% = 96,80\%$$

1. Analisis Varians

Anggaran belanja terserap 96.80%, Penghematan anggaran belanja yang dilakukan dalam tahun 2012 sebesar 109.918.649 atau 3,20% dari total APBD.

2. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja pada tahun 2012 sebesar 97% hal ini mengindikasikan bahwa anggaran belanja atas gaji dan tunjangan mengalami sisa anggaran (defisit). Kinerja pemerintah daerah pada tahun 2012 dinilai efisien karena realisasi lebih kecil dari jumlah yang di anggarkan.

4.2 Analisis Anggaran Gaji dan Tunjangan Tahun 2013

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
		s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
BELANJA	8.357.689.773,85	0,00	7.977.142.282,00	7.977.142.282,00	-380.547.491,85
BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.106.386.943,85	0,00	3.874.632.421,00	3.874.632.421,00	-231.754.522,85
BELANJA PEGAWAI	4.106.386.943,85	0,00	3.874.632.421,00	3.874.632.421,00	-231.754.522,85
BELANJA LANGSUNG	4.251.302.830,00	0,00	4.102.509.861,00	4.102.509.861,00	-148.792.969,00
Belanja Pegawai	715.857.225,00	0,00	664.132.225,00	664.132.225,00	-51.725.000,00
Belanja Barang dan Jasa	2.393.460.160,00	0,00	2.321.915.253,00	2.321.915.253,00	-71.544.907,00
Belanja Modal	1.141.985.445,00	0,00	1.116.462.383,00	1.116.462.383,00	-25.523.062,00
SURPLUS / DEFISIT	-8.357.689.773,85	0,00	-7.977.142.282,00	-7.977.142.282,00	380.547.491,85
SISA LEBIH / KURANG TAHUN BERKENAAN	-8.357.689.773,85	0,00	-7.977.142.282,00	-7.977.142.282,00	380.547.491,85

Gambar 3 : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2013

$$REB = \frac{3.874.632.421,00}{4.106.386.943,85} \times 100\% = 94,35\%$$

$$\times 100 \% = 94,36 \%$$

4.106.386.943,85

1. Analisis Varians

Anggaran belanja terserap 94,36%, Penghematan anggaran belanja pada tahun 2013 sebesar 231.754.522 atau 5,64% dari total APBD.

2. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja pada tahun 2012 sebesar 97% sedangkan pada tahun 2013 pemerintah mengalami kenaikan dalam efisiensi anggaran belanja. Ini dapat dilihat dengan menurunnya persentase dari perhitungan analisis rasio anggaran belanja yaitu sebesar 94%. Penurunan terjadi dikarenakan adanya mutasi pegawai. Kinerja pemerintah daerah pada tahun 2013 dinilai efisien karena realisasi lebih kecil dari jumlah yang di anggarkan.

4.3 Analisis Anggaran Gaji dan Tunjangan Tahun 2014

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
		s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
BELANJA	9.683.662.300,00	0,00	8.974.564.066,00	8.974.564.066,00	-709.098.234,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.450.935.300,00	0,00	3.936.383.284,00	3.936.383.284,00	-514.552.016,00
BELANJA PEGAWAI	4.450.935.300,00	0,00	3.936.383.284,00	3.936.383.284,00	-514.552.016,00
BELANJA LANGSUNG	5.232.727.000,00	0,00	5.038.180.782,00	5.038.180.782,00	-194.546.218,00
Belanja Pegawai	1.164.400.000,00	0,00	1.157.984.300,00	1.157.984.300,00	-6.415.700,00
Belanja Barang dan Jasa	3.238.168.830,00	0,00	3.071.947.152,00	3.071.947.152,00	-166.221.678,00
Belanja Modal	830.158.170,00	0,00	808.249.330,00	808.249.330,00	-21.908.840,00
SURPLUS / DEFISIT	-9.683.662.300,00	0,00	-8.974.564.066,00	-8.974.564.066,00	709.098.234,00
SISA LEBIH / KURANG TAHUN BERKENAAN	-9.683.662.300,00	0,00	-8.974.564.066,00	-8.974.564.066,00	709.098.234,00

Gambar 4 - Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2014

$$REB = \frac{3.936.383.284,00}{4.450.935.300,00} \times 100 \% = 88,44 \%$$

1. Analisis Varians

Penghematan anggaran belanja pada tahun 2014 sebesar 514.552.016 atau 11,56% dari total APBD.

2. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja pada tahun 2013 sebesar 94% sedangkan pada tahun 2014 pemerintah mengalami kenaikan dalam hal efisiensi anggaran belanja hal ini dapat dilihat dengan menurunnya persentase dari perhitungan analisis rasio anggaran belanja sebesar 88%. Penurunan terjadi dikarenakan adanya mutasi pegawai dan pegawai pensiun. Kinerja pemerintah daerah pada tahun 2014 dinilai sangat efisien karena realisasi lebih kecil dari jumlah yang di anggarkan.

4.4 Analisis Anggaran Gaji dan Tunjangan Tahun 2015

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
		s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
BELANJA	14.576.174.038,00	0,00	13.795.879.731,00	13.795.879.731,00	-780.294.307,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.968.108.781,00	0,00	4.801.494.917,00	4.801.494.917,00	-166.613.864,00
BELANJA PEGAWAI	4.968.108.781,00	0,00	4.801.494.917,00	4.801.494.917,00	-166.613.864,00
BELANJA LANGSUNG	9.608.065.257,00	0,00	8.994.384.814,00	8.994.384.814,00	-613.680.443,00
Belanja Pegawai	1.243.920.000,00	0,00	1.204.671.100,00	1.204.671.100,00	-39.248.900,00
Belanja Barang dan Jasa	5.411.754.000,00	0,00	4.942.107.874,00	4.942.107.874,00	-469.646.126,00
Belanja Modal	2.952.391.257,00	0,00	2.847.605.840,00	2.847.605.840,00	-104.785.417,00
SURPLUS / DEFISIT	-14.576.174.038,00	0,00	-13.795.879.731,00	-13.795.879.731,00	780.294.307,00
SISA LEBIH / KURANG TAHUN BERKENAAN	-14.576.174.038,00	0,00	-13.795.879.731,00	-13.795.879.731,00	780.294.307,00

Gambar 5 : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015

$$REB = \frac{4.801.494.917,00}{4.968.108.781,00} \times 100 \% = 96,65 \%$$

1. Analisis Varians

Penghematan anggaran belanja yang dilakukan dalam tahun 2015 sebesar 166.613.864 atau 3,35% dari total APBD.

2. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja pada tahun 2014 sebesar 84% sedangkan pada tahun 2015 pemerintah mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya persentase dari perhitungan analisis rasio anggaran belanja sebesar 97%. Peningkatan disebabkan adanya kenaikan gaji dan tunjangan pegawai. Kinerja pemerintah daerah pada tahun 2015 dinilai efisien karena realisasi lebih kecil dari jumlah yang di anggarkan,

4.5 Analisis Anggaran Gaji dan Tunjangan Tahun 2016

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
		s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
BELANJA	17.864.060.168,00	0,00	17.173.482.979,00	17.173.482.979,00	-690.577.189,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.659.324.410,00	0,00	5.469.024.008,00	5.469.024.008,00	-190.300.402,00
BELANJA PEGAWAI	5.659.324.410,00	0,00	5.469.024.008,00	5.469.024.008,00	-190.300.402,00
BELANJA LANGSUNG	12.204.735.758,00	0,00	11.704.458.971,00	11.704.458.971,00	-500.276.787,00
Belanja Pegawai	740.235.000,00	0,00	707.087.000,00	707.087.000,00	-33.148.000,00
Belanja Barang dan Jasa	10.381.870.808,00	0,00	9.970.738.771,00	9.970.738.771,00	-411.132.037,00
Belanja Modal	1.082.629.950,00	0,00	1.026.633.200,00	1.026.633.200,00	-55.996.750,00
SURPLUS / DEFISIT	-17.864.060.168,00	0,00	-17.173.482.979,00	-17.173.482.979,00	690.577.189,00
SISA LEBIH / KURANG TAHUN BERKENAAN	-17.864.060.168,00	0,00	-17.173.482.979,00	-17.173.482.979,00	690.577.189,00

Gambar 6 : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016

$$REB = \frac{5.469.024.008,00}{5.659.324.410,00} \times 100 \% = 96,64 \%$$

1. Analisis Varians

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Anggaran untuk belanja tidak langsung (Pegawai) tahun 2016, secara umum terdapat selisih anggaran belanja bersaldo negatif. Hal ini mengindikasikan adanya efisiensi atau penghematan anggaran. Anggaran belanja terserap 96,64%, Penghematan anggaran belanja yang dilakukan dalam tahun 2016 sebesar 190.300.402 atau 3,36% dari total APBD.

2. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja pada tahun 2015 sebesar 97% sedangkan pada tahun 2016 sebesar 97%. Hasil untuk tahun 2015 dan 2016 menunjukkan persentase dengan jumlah yang sama. Kinerja pemerintah daerah pada tahun 2016 dinilai efisien karena realisasi lebih kecil dari jumlah yang di anggarkan

5. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai analisis anggaran gaji dan tunjangan pada Kantor Kecamatan Bandung Kidul, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme penyusunan anggaran gaji dan tunjangan pada Kantor Kecamatan Bandung Kidul sudah berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari tahapan pada saat melakukan penggajian yang sudah sesuai dengan peraturan kerja Pemerintah Daerah.
2. Perbandingan anggaran gaji dan tunjangan dengan menggunakan perhitungan Rasio Efisiensi Belanja dapat disimpulkan bahwa perbandingan selama tahun 2012-2016 dinilai baik, karena realisasi lebih kecil dari jumlah yang di anggarkan. Rata-rata persentase dengan menggunakan perhitungan rasio efisiensi berada pada angka persentase 90%.
3. Belanja Tidak Langsung (Pegawai) selama tahun 2012-2016, secara umum terdapat selisih anggaran belanja bersaldo negatif. Hal ini mengindikasikan adanya efisiensi atau penghematan anggaran pada setiap tahunnya. Jumlah penghematan tersebut jika dilihat dari persentasenya memang tidak begitu besar, namun jika dilihat dari nominalnya cukup signifikan Begitu juga alasan yang telah di kemukakan pada bab sebelumnya selisih anggaran dan realisasi tersebut cukup beralasan dan dapat di pertanggungjawabkan.
4. Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, kinerja keuangan dalam penilaian anggaran gaji dan tunjangan dapat dikatakan baik, karena pada penetapan anggaran sampai pada saat perealisasiian tidak terlihat adanya kendala dan kegiatan sudah sesuai dengan peraturan kerja Pemerintah Daerah.

Daftar Pustaka :

- [1] Wiradi, 2010. *Makna dan Pengertian Analisis*. Dalam situs <http://www.anneahira.com/pengertian.html> (Diakses Pukul 10.03 pm pada Tanggal 26 Agustus 2016)
- [2] Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- [3] Tendi Haruman & Sri Rahayu. *Penyusunan Anggaran Perusahaan*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha ilmu, 2013.

- [4] Nafarin, M. *Penganggaran Perusahaan*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- [5] Christina Ellen, M.Fuad, dkk. *Anggaran Perusahaan Suatu Pendekatan Praktis*. Edisi Pertama. Jakarta: Gramedia Putaka utama, 2011.
- [6] Nordiawan, Dedi. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- [7] Bastian, Indra. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- [8] Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Andi, 2009.
- [9] Fahmi, Irfan. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Ketiga. Bandung: Alfabeta, 2012.
- [10] Mangkunegara, A.P. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Edisi Kedua. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- [11] Wahyudi, Bambang. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Pertama. Jakarta: Sulita, 2012
- [12] Alwi, Syafaruddin. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi, 2011.
- [13] Nayla, A.P. *Sistem Administrasi Gaji dan Upah*. Edisi Pertama. Jakarta: Laksana, 2014.
- [14] Mulyadi. *Sistem Akuntansi*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat, 2010.
- [15] Rahmawati, Maulidah. *Akuntansi Pemerintahan*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- [16] Rudianto. *Akuntansi Koperasi*. Edisi Kedua. Jakarta: Erlangga, 2010.
- [17] Adisaputro, Gunawan. *Manajemen Pemasaran Analisis Untuk Perancangan Strategi Pemasaran*. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010.
- [18] Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 Pasal 2 ayat (1)